

2.1.2 Kondisi Penduduk Kota Makassar.....	23
2.1.3 Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik.....	26
2.2 Etnis Tionghoa di Kota Makassar .....	32
2.2.1 Awal Mula Kedatangan Etnis Tionghoa di Kota Makassar.....	32
2.2.2 Permukiman dan Populasi Etnis Tionghoa di Kota Makassar.....	38
2.2.3 Masyarakat Tionghoa di Kota Makassar Pasca Kemerdekaan hingga Masa Orde Baru .....	44
<b>BAB III PERISTIWA 10 NOVEMBER 1965: DARI DEMONSTRASI HINGGA PENGRUSAKAN PROPERTI ETNIS TIONGHOA .....</b>	<b>51</b>
3.1 Situasi Kota Makassar Pasca Gerakan 30 September 1965 .....	51
3.2 Peristiwa 10 November 1965: Terseretnya Etnis Tionghoa dalam Gelombang Gerakan Anti Komunis Pasca G30S.....	56
3.3 Reaksi Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah untuk Memulihkan Keadaan.....	67
3.4 Makna Historis Kekerasan Terhadap Etnis Tionghoa tahun 1965.....	73
<b>BAB IV PENGGANYANGAN ETNIS TIONGHOA DALAM KERUSUHAN UJUNG PANDANG TAHUN 1997.....</b>	<b>76</b>
4.1 Terbunuhnya Anni Mujahidah Rasunah: Pemicu Kerusuhan .....	77
4.2 Kerusuhan yang Meluas .....	80
4.2.1 Dari Pengrusakan menjadi Pembakaran dan Penjarahan .....	82
4.2.2 Mukenah, Sajadah, dan Tulisan “Pribumi” Jadi Pelindung.....	92
4.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kerusuhan .....	94
4.4 Dampak Kerusuhan .....	99
4.5 Pengalaman dan Ketakutan yang Berlanjut.....	106
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
5.1 Kesimpulan.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>117</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Potret aparat keamanan sedang melakukan penyisiran .....	84
Gambar 4.2 Paradise Karaoke mulai terbakar.....	85
Gambar 4.3 Petugas Pemadam Kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar Vihara Ibu Agung Bahari, dan proses evakuasi warga yang terjebak di dalam rumahnya.....	87
Gambar 4.4 Sisa-sisa sebuah mobil kijang yang telah dibakar massa .....	89

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Perkembangan Penduduk Kotamadya Ujung Pandang	
Tahun 1965-1975.....	25
Tabel 1.2 Perkembangan Penduduk Kotamadya Ujung Pandang Tahun	
1993-1998 .....	26
Tabel 4.1 Rincian jumlah kerugian berdasarkan kecamatan.....	103

## **DAFTAR SINGKATAN**

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Baperki	: Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia
Brigjen Pol	: Brigadir Jenderal Polisi
Brimob	: Brigade Mobil
BTI	: Barisan Tani Indonesia
CGMI	: Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia
CONEFO	: Conference of The New Emerging Forces
G30S	: Gerakan Tiga Puluh September
Gerwani	: Gerakan Wanita Indonesia
GMM	: Gerakan Mahasiswa Makassar
GP Anshor	: Kelompok Pemuda Nahdatul Ulama
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IKIP	: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
IPPI	: Ikatan Peladjar Indonesia
KAMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KAP Gestapu	: Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September
KAPI	: Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia
Kapolda	: Kepala Kepolisian Daerah
Kapoltabes	: Kepala Kepolisian Kota Besar
KBM	: Kota Besar Makassar
KODAM	: Komando Daerah Militer
Kodim	: Komando Distrik Militer
Kol Pol	: Kolonel Polisi
KOTI	: Komando Operasi Tertinggi
Lekra	: Lembaga Kebudayaan Rakyat

NIT	: Negara Indonesia Timur
Orpol, ormas	: Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat
Pangdam	: Panglima Komando Daerah Militer
Pangdam	: Panglima Komando Daerah Militer
Parpol	: Partai Politik
PDTI	: Partai Demokratik Tionghoa Indonesia
Pepelrada Sulsera	: Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara
Perhimi	: Perhimpunan Mahasiswa Indonesia
Permesta	: Perdjjuangan Semesta Alam
PERTIP	: Persatuan Tionghoa Peranakan
PERTIP	: Persatuan Tionghoa Peranakan
PKI	: Partai Komunis Indonesia
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
Poltabs-UP	: Kepolisian Resor Kota Besar-Ujung Pandang
PPI	: Permusyawaratan Pemuda Indonesia
PR	: Pemuda Rakyat
PTIP	: Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RRC/RRT	: Republik Rakyat China/Republik Rakyat Tiongkok
RRI	: Radio Republik Indonesia
RS	: Rumah Sakit
RT/RW	: Rukun Tetangga/Rukun Warga
Ruko	: Rumah Toko
SARA	: Suku, agama, ras, dan antar golongan
SD	: Sekolah Dasar
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMU	: Sekolah Menengah Umum

SOBSI : Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia  
Sulsel : Sulawesi Selatan  
Unhas : Universitas Hasanuddin  
Unismuh Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar

## ABSTRAK

**Yuliana (F81115009), dengan judul “Kekerasan Terhadap Etnis Tionghoa di Kota Makassar pada Masa Transisi (Tahun 1965 dan 1997)” yang dibimbing oleh Dr. Ilham, S.S., M.Hum. dan Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, LCP., M.Hum.**

Skripsi ini membahas mengenai peristiwa kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Kota Makassar pada tahun 1965 dan 1997, di mana kedua peristiwa tersebut terjadi beriringan dengan proses transisi rezim secara nasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode sejarah yang meliputi beberapa tahapan yaitu, pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah.

Setelah melewati serangkaian tahapan, hasil penelitian menunjukkan, penganyangan etnis Tionghoa di Kota Makassar pada tahun 1965 tidak lain merupakan salah satu imbas dari perubahan situasi politik masa transisi yang diakibatkan oleh peristiwa Gerakan 30 September di Jakarta. Akan tetapi perubahan situasi politik tidak serta merta mendorong terjadinya kekerasan terhadap etnis Tionghoa, ada faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi. Sedangkan untuk peristiwa kerusuhan pada tahun 1997 di Kota Makassar, meskipun faktor ekonomi disebut-sebut sebagai faktor yang paling mempengaruhi terjadinya kerusuhan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi hanya salah satu diantara beberapa faktor kompleks lain yang juga tidak dapat diabaikan seperti situasi krisis ekonomi dan mulai melemahnya rezim orde baru. Seperti halnya yang terjadi pada tahun 1965, kerusuhan tahun 1997 di Kota Makassar pun secara umum adalah serangan yang lebih ditujukan terhadap properti etnis Tionghoa dibandingkan dengan orangnya secara langsung.

**Kata Kunci: Etnis Tionghoa, Kota Makassar, Kekerasan, dan Transisi.**

## **ABSTRACT**

**Yuliana (F81115009) , “Violence Against Ethnic Chinese in Makassar City in the Transition Period (1965 and 1997)”. Supervisors: Dr, Ilham, S.S., M.Hum. and Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, LCP., M.Hum.**

This thesis discusses two violent incidents against ethnic Chinese that occurred in 1965 and 1997 in Makassar City, within the context of the national regime transition process in Indonesia. I used the historical method in my research which included several stages such as the selection of the topic, the collection, verification, analysis, and interpretation of sources, and historical writing.

The findings of my study show that the violence against ethnic Chinese in 1965 in Makassar was an effect of the changes in political situation during the transition period. These changes were driven by the events of the September 30<sup>th</sup> movement in Jakarta. However, not only the changing political situation encouraged the violence against them; there were other factors that influenced it. Regarding the 1997 riots in Makassar, economic factors have been usually pointed out as the most influential cause of their occurrence. My research shows that economic factors are only one of several other complex reasons that help to explain these riots; the economic crisis and the weakening of the New Order regime cannot be ignored in accounting for their occurrence. Like what happened in 1965, the 1997 riots in Makassar were in general more an attack against the property of ethnic Chinese than an attack against ethnic Chinese people in themselves.

**Keywords: Ethnic Chinese, Makassar City, Violence, Transition Period.**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara historis, kekerasan terhadap etnis Tionghoa bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah Indonesia. Selain peristiwa Geger Pecinan di Batavia (sekarang Jakarta) pada tahun 1740, yang disebut mengorbankan lebih dari 10.000 etnis Tionghoa, kekerasan dalam berbagai bentuk juga terjadi dalam dekade-dekade selanjutnya. Pada awal abad ke 20, mula-mula diantaranya terjadi di Solo (1912) dan Kudus (1918). Namun, jika dalam peristiwa Geger Pecinan ialah VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) yang melakukan pembantaian terhadap etnis Tionghoa, maka dalam dua peristiwa yang disebut terakhir kekerasan terjadi antara masyarakat etnis Tionghoa dengan Pribumi.<sup>1</sup>

Setelah Indonesia melepas diri dari kolonialisme, kekerasan terhadap etnis Tionghoa tidak hilang begitu saja seiring terbentuknya negara dan bangsa Indonesia yang disemboyankan “Bhineka Tunggal Ika”. Kekerasan yang menyasar etnis Tionghoa tercatat pernah pecah di beberapa tempat di Indonesia, sebut saja Peristiwa di Tangerang dan Kebumen (1946), Bagan Siapi-api (1946), Palembang (1947) dan seterusnya, termasuk pasca peristiwa Gerakan 30 September

---

<sup>1</sup> Istilah “pribumi” umum digunakan dalam berbagai studi mengenai etnis Tionghoa di Indonesia. Istilah lain yang juga kerap digunakan ialah “Orang Indonesia”, keduanya digunakan untuk menyebut orang-orang “Indonesia asli”. Namun, sama sekali tidak berarti bahwa seorang WNI keturunan Tionghoa bukan termasuk bangsa Indonesia. Penggunaan istilah “pribumi” atau pembatasan istilah “Orang Indonesia” untuk orang “Indonesia asli” saja semata merupakan cara termudah untuk membedakan kedua kelompok etnis itu untuk mempermudah bahasan dan menghindari kerancuan.

(1965/1966) hingga tragedi jelang reformasi tahun 1998. Mengenai kondisi minoritas Tionghoa di Indonesia, Wang Gungwu yang juga banyak mengkaji tentang etnis Tionghoa di Indonesia dan Asia pernah menulis:

“Tidak ada suatu golongan Cina perantauan di dunia yang sesudah Perang Dunia II, artinya sesudah berakhirnya kolonialisme Barat di kawasan Asia, mengalami demikian banyak keguncangan seperti minoritas Cina di Indonesia. Sebab sejarah Indonesia sendiri, yang mengalami demikian banyak gelombang perubahan, dengan sendirinya berakibat pada masyarakatnya, termasuk golongan minoritas...<sup>2</sup>”

Diantara peristiwa-peristiwa kekerasan yang dialami etnis Tionghoa, Gerakan 30 September (dalam banyak literatur yang digunakan disebut juga Kudeta 1965) adalah peristiwa yang sangat krusial dan berdampak besar terhadap etnis Tionghoa di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Para Tionghoa perantauan dianggap bertanggung jawab atas apa yang dituduhkan sebagai peranan RRC dalam kup yang tidak berhasil itu. Perasaan anti-Cina melambung tinggi dan orang Tionghoa mengalami masa yang sulit.<sup>3</sup>

Setelah masa dua tahun setelah percobaan kudeta, kekerasan anti Tionghoa sangat meluas seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, meliputi ledakan- ledakan di semua pulau utama (kecuali Irian Barat), tetapi kekerasan itu tidak terus-menerus terjadi dalam kurun waktu itu.<sup>4</sup> Periode ini adalah masa transisi rezim dari orde lama ke orde baru.

---

<sup>2</sup> Wang Gungwu mengenai minoritas Cina di Indonesia, lihat Onghokham, “Sejarah Berkembang, Adakah Harapan Bagi Minoritas (Pengantar)” dalam Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hlm. IX.

<sup>3</sup> Leo Suryadinata, *Ibid.* hlm. 144.

<sup>4</sup> Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm.127.

Selama ledakan kekerasan di sekitar peristiwa Gerakan 30 September itu, kekerasan di Makassar adalah salah satu yang eskalasinya cukup besar selain di Medan. Dalam setiap ledakan, kekerasan itu berkaitan dengan demonstrasi ke kantor konsulat Tiongkok.

Di Makassar, demonstrasi anti Tionghoa di konsulat pada tanggal 10 November 1965 diselenggarakan oleh organisasi mahasiswa dan pemuda Islam HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan Ansor. Demonstrasi itu sengaja diadakan bertepatan waktunya dengan hari besar nasional, hari pahlawan. Beribu-ribu kaum perusuh sepanjang hari itu dan hari berikutnya mengamuk secara gila-gilaan terhadap golongan Tionghoa. Sasaran kaum perusuh, untuk sebagian besar, lebih ditujukan kepada gedung dan milik orang Tionghoa lainnya daripada orangnya sendiri, tetapi kerusuhan yang terjadi sangat luas. Menurut nota protes kedutaan besar Tiongkok, toko dan rumah dari 2.000 lebih keluarga Tionghoa mengalami kerusakan dalam berbagai tingkatan, dan hampir 1.000 keluarga diantaranya menjadi bangkrut. Menjelang akhir minggu, kerusuhan itu merembet ke beberapa pusat lain di Sulawesi Selatan.<sup>5</sup>

Kemudian setelah berselang kurang lebih 32 tahun, peristiwa yang hampir serupa kembali terjadi pada pertengahan September 1997. Tahun-tahun penuh gejolak politik menyambut era reformasi tersebut diwarnai dengan beragam kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Di Kota Makassar, dalam kerusuhan yang berlangsung selama sehari-hari, properti milik etnis Tionghoa menjadi sasaran

---

<sup>5</sup> Charles A. Coppel, *Ibid.*

utama massa, ada yang dihancurkan, dibakar, dan barang-barangnya dijarah. Peristiwa tersebut dipicu oleh terbunuhnya seorang bocah perempuan bernama Ani Mujahidah Rasunah (9) oleh Beny Karre (23), seorang warga keturunan Tionghoa yang mengidap kelainan jiwa (*schizophrenia paranoia*).<sup>6</sup>

Meskipun pada akhirnya Benny juga meninggal pada malam itu setelah dihakimi warga yang murka terhadap tindakannya, serangan yang menyasar properti etnis Tionghoa tidak terelakkan pasca kejadian itu. Malam itu juga, dari laporan *Kompas*, Kapuspen ABRI, Brigjend TNI Abdul Wahab Mokodongan, menyebutkan bahwa sebenarnya kemarahan massa karena ulah Benny sempat mereda, namun beberapa saat kemudian muncul isu yang mengarah ke SARA (suku, ras, agama, dan antar golongan) yang terus berkembang di masyarakat sehingga terkumpul sampai 400 orang yang kemudian melakukan pengrusakan terhadap toko-toko dan rumah-rumah WNI keturunan (etnis Tionghoa).<sup>7</sup>

Bermula dari pelemparan rumah dan toko-toko di sekitar rumah Benny, pengrusakan terus merambat ke beberapa sudut kota. Massa yang bergerak dari Jalan Kumala ramai-ramai menysisir Jalan Mappaoddang, Cendrawasih, Haji Bau, Penghibur, Pasar Ikan, Nusantara, Sulawesi, Tentara Pelajar, Irian, dan Sarappo<sup>8</sup>. Aksi itu terus berlangsung hingga beberapa hari berikutnya dan kerugian materil

---

<sup>6</sup> Muslimin A.R. Effendy, "Tionghoa-Makassar di Tengah Pusaran Sejarah", dalam Dias Pradadimara dan Muslimin A.R. Effendy, *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004), hlm. 210.

<sup>7</sup> *Kompas*, 17 September 1997, hlm. 15.

<sup>8</sup> *Pedoman Rakyat*, 17 September 1997, hlm. 1.

yang dialami akibat peristiwa ini belasan milyar, sebuah angka yang tidak sedikit untuk zaman itu.

Berdasarkan uraian singkat di atas, menarik bahwa kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Kota Makassar baru terjadi pada tahun 1965 meski etnis Tionghoa sendiri sudah berabad-abad lamanya tinggal di wilayah ini. Tahun 1965 sendiri merupakan awal masa transisi dari orde lama ke orde baru, dan peristiwa kekerasan serupa kembali terjadi pada tahun 1997, yang juga merupakan awal dari masa transisi dari orde baru ke reformasi. Karenanya, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“KEKERASAN TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI KOTA MAKASSAR PADA MASA TRANSISI (TAHUN 1965 DAN 1997)”**.

Transisi sebagai sebuah momen perubahan adalah masa dimana konflik dan kekerasan biasanya merebak. Di saat transisi berlangsung, terjadi fenomena kekerasan dalam pelbagai bentuk di beberapa tempat di tanah air, seperti pembunuhan, perampokan, penembakan gelap, intimidasi, pengeboman, tawur massal, penyerangan, pengusiran, dan macam-macam bentuk kekerasan lainnya. Mengenai hal ini beberapa spekulasi bermunculan, sebagian melihatnya wajar (logis) terjadi di era transisi sebagai reaksi atas terbukanya katup-katup penekan yang terpasang puluhan tahun, sehingga ketika kebebasan diberikan, reaksi masyarakat laksana air bah yang melanda dan tidak terbandung meluapkan protes atau ketidaksukaannya terhadap apa saja dengan cara-cara (salah satunya) kekerasan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Suparman Marzuki, “Kekerasan dan Ketakutan pada Kekerasan”, *Jurnal Unisia*, No. 61, Tahun XXIV, Triwulan III, 2006. hlm. 317-318.

## 1.2 Batasan Masalah

Dalam penulisan sejarah, batasan masalah terdiri dari batasan spasial dan temporal. Batasan spasial penelitian ini sendiri adalah Kota Makassar pada kisaran tahun 1965 dan 1997, sesuai dengan batasan temporal dari penelitian ini.

Tahun 1965 Kota Makassar adalah Kotamadya yang ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya, berdasarkan UU No.29 tahun 1959 status Kota Makassar adalah Kotapraja dengan luas wilayah kurang lebih 21 Km<sup>2</sup> (Kilometer persegi). Kota Makassar pada saat itu adalah yang wilayahnya di utara berbatasan dengan selat Makassar, di timur berbatasan dengan daerah swapraja Gowa serta sungai Tallo, di sebelah selatan dengan swapraja Gowa, dan di barat dengan selat Makassar<sup>10</sup>. Luas wilayah tersebut bertahan hingga tahun 1971 ketika pemerintah Kota Makassar melakukan perluasan kota melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971. Peraturan tersebut memperluas Kota Makassar dengan memasukkan beberapa wilayah dari daerah Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkep (Pangkajene Kepulauan)<sup>11</sup>.

Beberapa pertimbangan yang mendorong penulis untuk memilih Kota Makassar diantaranya: di kota-kota di luar pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan,

---

<sup>10</sup> Joyce Gani, *Cina Makassar: Suatu Kajian Tentang Masyarakat Cina di Indonesia (1906-1959)*, Skripsi Sarjana, Makassar, Jurusan Sejarah dan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1990, hlm. 18-19.

<sup>11</sup> Kabupaten Gowa menyerahkan: Barombong, Karuwisi, Panaikang, Tello Baru, Antang, Tamangapa, Jongaya, Maccini Sombala, dan Mangasa. Kabupaten Maros menyerahkan: Bira, Daya, Tamalanrea, Bulurokeng, dan Sudiang. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyerahkan: Barrang Caddi, Barrang Lompo, dan Perjuangan/ Kodingareng. Lihat P.P. No. 51 tahun 1971.

Makassar merupakan salah satu kota dimana jumlah penduduk etnis Tionghoa-nya cukup besar. Di Sulawesi Selatan sendiri, jumlah penduduk etnis Tionghoa di Makassar terbesar dibandingkan daerah lainnya.

Selain itu, kekerasan terhadap etnis Tionghoa yang terjadi pada tahun 1965 dan 1997 merupakan peristiwa kekerasan etnis yang cukup besar yang pernah terjadi di Kota Makassar. Kedua peristiwa tersebut juga terjadi dalam masa-masa awal transisi rezim secara nasional, sehingga penulis sangat tertarik untuk mengkaji kedua peristiwa tersebut.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana terjadinya peristiwa kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Kota Makassar pada tahun 1965 dan 1997?
2. Bagaimana pemerintah Kota Makassar menyikapi kekerasan yang terjadi terhadap etnis Tionghoa di Kota Makassar pada tahun 1965 dan 1997?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan peristiwa kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Kota Makassar yang terjadi pada tahun 1965 dan 1997.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah merespon dan menyikapi terjadinya peristiwa kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Kota Makassar tahun 1965 dan 1997.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memahami peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap etnis Tionghoa yang pernah terjadi di Kota Makassar utamanya yang terjadi pada tahun 1965 dan 1997.
2. Secara umum hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memperkaya karya akademik mengenai etnis Tionghoa di Kota Makassar, terutama berkaitan dengan kekerasan yang pernah dialami kelompok etnis tersebut.
3. Hasil penelitian ini kiranya juga diperlukan untuk memahami bagaimana peristiwa kekerasan terhadap suatu etnis minoritas dapat terjadi dalam sebuah kota yang plural. Dengan memahami hal tersebut maka dapat diupayakan langkah mitigasi untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi di masa yang akan datang.

### **1.6 Tinjauan Pustaka**

Kajian atau studi tentang kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia adalah sesuatu yang penting mengingat peristiwa seperti itu telah berulang kali terjadi di Indonesia. Berbagai motif menjadi latar belakang dari terjadinya kekerasan-kekerasan tersebut, diantaranya motif ekonomi, politik, sosial budaya, dan lainnya. Karena itu, sudah banyak sekali kajian-kajian yang dilakukan oleh akademisi dari berbagai bidang ilmu, baik dari sejarah, politik, maupun bidang keilmuan lainnya, yang melihat fenomena atau kejadian kekerasan seperti itu. Berikut ini beberapa studi pustaka hasil penelusuran penulis, baik dari kajian ilmu sejarah sendiri maupun di luar kajian-kajian sejarah yang nantinya akan memperkaya studi ini.



Salah satu studi sejarah yang penting tentang masyarakat etnis Tionghoa di Kota Makassar dilakukan oleh Yerry Wirawan dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar*<sup>12</sup>. Di Bab IV, Yerry menulis tentang etnis Tionghoa di Kota Makassar pada masa Republik Indonesia dengan rentang tahun 1950 hingga 1965. Disini Yerry menulis beberapa persoalan yang dialami masyarakat etnis Tionghoa di masa awal Republik Indonesia, termasuk persoalan yang dialami etnis Tionghoa di Kota Makassar. Persoalan yang disinggung diantaranya persoalan kewarganegaraan dan kebijakan politik Indonesia yang membatasi etnis Tionghoa. Tulisan ini menjadi penting bagi penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kehidupan etnis Tionghoa di Kota Makassar pada tahun 1960an.

Sebuah studi lain dilakukan oleh dua jurnalis, yaitu Sukriansyah S Latif dan Tomi Lebang yang lalu tulisannya dibukukan dengan judul *Amuk Makassar*<sup>13</sup>. Buku ini membahas kejadian kerusuhan di Kota Makassar (pada masa itu disebut Ujung Pandang) pada September 1997. Buku yang diterbitkan pada Februari 1998 atau selang beberapa bulan pasca kejadian ini ditulis dengan gaya penulisan jurnalistik, sesuai dengan latar belakang penulisnya. Buku ini sendiri menjadi salah satu sumber literatur yang sangat menunjang untuk melihat peristiwa kerusuhan yang

---

<sup>12</sup> Yerry Wirawan, *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar*, (Jakarta: KPG, 2013).

<sup>13</sup> Sukriansyah S. Latif dan Tomi Lebang, *Amuk Makassar*, (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1998).

terjadi di tahun 1997, di mana di dalamnya juga terdapat kesaksian dari orang-orang yang melihat langsung kejadian tersebut.

Jemma Purdey yang topik risetnya meliputi politik dan sejarah kontemporer Indonesia menulis disertasi yang kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul *Kekerasan Anti Tionghoa di Indonesia 1996-1999*<sup>14</sup>. Buku ini merupakan hasil studi kekerasan anti Tionghoa selama periode transisi sosial, politik, dan ekonomi serta masa kekacauan di Indonesia. Buku ini turut memperkaya literatur mengenai kekerasan yang dialami etnis Tionghoa di Indonesia pada periode tahun 1990-an, dimana salah satunya juga terjadi di Kota Makassar pada tahun 1997.

Hasil studi lain tentang etnis Tionghoa yang juga penting yaitu buku yang ditulis oleh Charles A. Coppel. Buku yang agaknya lebih fokus pada bidang politik dan terutama kebijakan pemerintah terhadap etnis Tionghoa itu berjudul *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*<sup>15</sup>. Buku ini menjadi penting terutama karena pada Bab III buku ini yang diberi judul Timbulnya Anti Tionghoa, turut disebutkan mengenai kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Kota Makassar yang terjadi pada tahun 1965.

Di bidang sejarah sendiri setidaknya ada beberapa buku, sebagaimana beberapa telah disebutkan di atas, namun yang lainnya juga yaitu buku *Dilema Minoritas Tionghoa*<sup>16</sup> tulisan Leo Suryadinata yang merupakan terjemahan dari

---

<sup>14</sup> Jemma Purdey, *Kekerasan Anti-Tionghoa di Indonesia 1996-1999*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2013).

<sup>15</sup> Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).

<sup>16</sup> Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984).

buku yang judul aslinya yaitu *Pribumi Indonesians, the Chinese and China: A study of Perceptions and Policies*. Buku ini relevan dengan topik penelitian ini, salah satunya karena batasan temporal penelitian ini juga dibahas dalam buku ini sehingga membantu penulis untuk melihat situasi dan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa pada masa tersebut. Dengan begitu, juga akan didapat gambaran mengenai problematika yang dihadapi oleh etnis Tionghoa dalam kurun waktu tersebut.

Penulis lainnya yaitu Muslimin A.R. Effendy yang juga pernah melakukan studi tentang etnis Tionghoa di Kota Makassar. Dalam tulisannya yang berjudul *Tionghoa Makassar di Tengah Pusaran Sejarah*<sup>17</sup>, ia menekankan pembahasan pada peran etnis Tionghoa dalam perjalanan Kota Makassar. Namun, ia pun tidak luput membahas secara ringkas mengenai kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Kota Makassar. Tulisan ini sendiri sangat penting bagi setiap studi mengenai etnis Tionghoa di Kota Makassar.

Untuk metode penelitian, studi ini menggunakan literatur dari beberapa buku, terutama buku *Pengantar Ilmu Sejarah*<sup>18</sup> dan *Metodologi Sejarah*<sup>19</sup> yang

---

<sup>17</sup> Muslimin A.R. Effendy, “Tionghoa-Makassar di Tengah Pusaran Sejarah”, dalam Dias Pradadimara dan Muslimin A.R. Effendy, *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004).

<sup>18</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995).

<sup>19</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003).

keduanya merupakan karya Kuntowijoyo. Selain itu, juga menggunakan tulisan Mona Lohanda, *Membaca Sumber Menulis Sejarah*.<sup>20</sup>

Beberapa tulisan dari berbagai studi di atas, yang telah dilakukan dan terkait dengan etnis Tionghoa baik di Kota Makassar maupun etnis Tionghoa di Indonesia secara umum, akan memberikan perspektif yang sangat penting untuk melihat peristiwa kekerasan yang dialami etnis Tionghoa di Kota Makassar, yang merupakan fokus dari penelitian ini.

Setelah melihat tinjauan pustaka, dapat dilihat bahwa sebenarnya peristiwa kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Kota Makassar tahun 1997 sudah ditulis dalam beberapa studi, termasuk dalam buku *Amuk Makassar*. Namun, buku tersebut lebih kepada memaparkan deskripsi dari peristiwa tersebut dan pandangan beberapa tokoh terkait pada masa itu, sedangkan studi ini akan berupaya melihat peristiwa kerusuhan tahun 1997 dalam konteks sejarah yang lebih luas.

### **1.7 Metode Penelitian**

Penelitian sejarah mempunyai lima tahapan, yaitu: (1) Pemilihan topik, (2) Pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) Interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan.<sup>21</sup> Berdasarkan tahapan tersebut, tahapan pertama yang harus dilakukan yaitu memilih topik.

#### **1. Pemilihan Topik**

---

<sup>20</sup> Mona Lohanda, *Membaca Sumber Menulis Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011).

<sup>21</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 69.

Secara personal, penulis sendiri memiliki ketertarikan terhadap isu kekerasan dan terutama yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Selain itu, berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, diketahui bahwa studi sejarah yang melihat fenomena kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Kota Makassar belum banyak dilakukan, kebanyakan merupakan studi bidang ilmu sosial lain seperti sosiologi, antropologi, dan komunikasi. Oleh karena itu, penulis akhirnya memilih topik kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Kota Makassar sebagai topik dari penelitian ini.

## 2. Pengumpulan Sumber

Setelah menentukan topik, maka tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan sumber atau sering disebut Heuristik. Dalam studi ini, tahap mengumpulkan sumber primer yang relevan dengan topik penelitian dilakukan melalui studi arsip dan wawancara.

Untuk studi arsip, penelusuran pertama dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Disini penulis menemukan beberapa arsip terutama yang berkaitan dengan peristiwa tahun 1965 terdaftar dalam inventaris Arsip Kotamadya Ujung Pandang Volume I. Dokumen arsip mengenai peristiwa tersebut juga didapatkan melalui pencarian di situs internet, di laman **National Security Archive** milik pemerintah Amerika Serikat (AS). Dokumen yang dibuka (tidak dirahasiakan lagi) pada Oktober 2017 lalu itu secara umum memuat catatan kedutaan besar AS di Jakarta tentang peristiwa seputar pembunuhan massal di Indonesia pada tahun 1965. Sumber lainnya yaitu

arsip koran Pedoman Rakyat tahun 1965. Sayangnya, kebanyakan arsip koran Pedoman Rakyat untuk tahun tersebut sudah dalam keadaan rusak dan sebagian besar tidak dapat dipergunakan sama sekali. Adapun koran yang masih dapat dipergunakan banyak diantaranya dalam keadaan setengah rusak dan halamannya telah hilang.

Arsip mengenai peristiwa September 1997 diperoleh dari koleksi koran perpustakaan Universitas Hasanuddin (Unhas). Koran-koran yang didapatkan antara lain *The Jakarta Post*, *Republika*, *Kompas*, *Suara Pembaruan* dan *Pedoman Rakyat*. Namun, diantara lima koran tersebut, yang paling banyak mengulas topik yang diteliti ialah *Pedoman Rakyat*.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, selain studi arsip, upaya pengumpulan sumber lainnya yang juga dapat dilakukan yaitu dengan metode wawancara. Dalam penelitian ini, upaya memperkaya sumber dengan metode wawancara juga dilakukan. Beberapa orang yang menjadi narasumber dalam penelitian ini terutama mereka adalah mereka yang mengalami dan atau menjadi saksi dari peristiwa kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Kota Makassar, baik yang terjadi pada tahun 1965 maupun 1997.

Untuk sumber sekunder, karena keterbatasan koleksi perpustakaan pusat Unhas maupun perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, maka penulis harus mencari alternatif lain. Terutama untuk kebutuhan sumber sekunder berupa buku, mayoritas merupakan koleksi pribadi penulis

ataupun orang lain yang pernah melakukan penelitian tentang etnis Tionghoa di Kota Makassar.

### 3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Semua sumber yang telah dikumpulkan, baik sumber primer maupun sekunder kemudian harus melewati tahapan ketiga, yaitu verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi itu ada dua macam: autentisitas, atau keaslian sumber atau kritik ekstern dan kredibilitas, atau kebiasaan dipercaya atau kritik intern.<sup>22</sup> Jadi, meskipun arsip dari segi kedudukannya sebagai sumber sejarah memperoleh tempat pertama karena diciptakan dalam suasana yang sezaman, autensitas dan kredibilitasnya tetap harus diverifikasi kembali, hal yang juga berlaku terhadap sumber-sumber sekunder.

### 4. Interpretasi

Pada tahap keempat, karena data tidak dapat berbicara dengan sendirinya, maka diperlukan interpretasi atau penafsiran dari penulis. Interpretasi itu sendiri ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan data-data yang telah terkumpul sedangkan sintesis berarti menyatukan data-data tersebut. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan keduanya dalam menginterpretasi data-data yang didapatkan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 77.

## 5. Penulisan Sejarah

Terakhir, yaitu tahap penulisan. Dalam penelitian sejarah, tahap ini sering disebut historiografi. Pendek kata, di tahap ini penulis menyajikan hasil dari penelitian, termasuk kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis sejarah. Penulisan tentunya harus memperhatikan aspek kronologis dari topik yang diteliti.

### 1.8 Sistematika Penulisan

#### 1. BAB I: Pendahuluan

Bab pertama sebagai pendahuluan akan memuat dasar dari penelitian ini, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### 2. BAB II: Gambaran Umum Kota Makassar Dan Etnis Tionghoa Makassar

Dalam bab kedua ini akan dipaparkan gambaran umum Kota Makassar pada masa orde lama dan orde baru. Selain itu, pada bab ini penulis juga akan membahas sejarah etnis Tionghoa di Kota Makassar secara umum.

#### 3. BAB III: Peristiwa 10 November 1965: Dari Demonstrasi Hingga Pengrusakan Properti Etnis Tionghoa

Bab ini akan membahas mengenai kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Kota Makassar pada tahun 1965, termasuk situasi dan kronologi, hingga dampak dari peristiwa kekerasan tersebut. Namun sebelum masuk pada pembahasan mengenai peristiwa kekerasan tersebut,



terlebih dahulu akan dijelaskan situasi di Kota Makassar pasca gerakan 30 September.

#### **4. BAB IV: Pengganyangan Etnis Tionghoa Dalam Kerusuhan Ujung Pandang Tahun 1997**

Pembahasan dalam bab ini akan mengulas mengenai kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Kota Makassar pada tahun 1997 atau yang juga disebut Kerusuhan Ujung Pandang tahun 1997. Secara umum bab ini akan terbagi ke dalam beberapa sub bab yang diantaranya akan membahas mengenai kronologi, penyebab, dan dampak dari peristiwa tersebut.

#### **5. BAB V Penutup**

Dalam bab terakhir ini akan dijabarkan kesimpulan dan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan temuan penulis selama proses penelitian.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KOTA MAKASSAR DAN ETNIS TIONGHOA MAKASSAR**

Kota Makassar tumbuh dari kota kolonial yang terbentuk di sekitar Benteng Rotterdam akhir abad ke-17. Permukiman-permukiman baru, seperti *Vlaardingen* dan Kampung Baru, tumbuh di sebelah utara dan selatan Benteng dan dihuni oleh masyarakat dari berbagai kelompok, termasuk Melayu, Cina, Belanda, Bugis, Jawa, dan tentu saja, kelompok masyarakat Makassar dari Gowa dan sekitarnya.<sup>1</sup> Dengan kata lain, sejak awal kemunculannya, kota ini adalah kota yang plural, dihuni oleh beragam etnis termasuk etnis Tionghoa, yang dari waktu ke waktu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kota ini. Meski begitu, latar belakang historis sebagai kota yang plural ternyata tak membuat kota ini terhindar dari permasalahan etnis yang pada muaranya berujung pada peristiwa kekerasan etnis, dalam hal ini terhadap masyarakat Tionghoa. Selain itu, untuk membahas etnis Tionghoa, sejarah dan dinamika kota ini juga perlu dijelaskan untuk dapat memahami mengapa peristiwa seperti kekerasan terhadap etnis Tionghoa dapat terjadi.

Pembahasan pada bab ini secara garis besar terdiri dari dua topik utama. Pertama, membahas gambaran umum Kota Makassar dalam rentang periode pasca kemerdekaan hingga masa orde baru. Kedua, membahas mengenai sejarah singkat masyarakat etnis Tionghoa di Kota Makassar dan gambaran umum kehidupannya dalam kurun pasca kemerdekaan hingga masa orde baru.

---

<sup>1</sup> Dias Pradadimara, "Dari Makassar ke Makassar: Proses Etnisisasi Sebuah Kota", dalam Dias Pradadimara dan Muslimin A.R. Effendy, *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 81.

## 2.1 Kota Makassar Pasca Kemerdekaan hingga Masa Orde Baru

Walaupun Ir. Soekarno telah memproklamkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, Kota Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan secara umum, tidak langsung terintegrasi begitu saja ke dalam wilayah Indonesia. Pasca Proklamasi Kemerdekaan, pengaturan kota Makassar justru kembali lagi dalam campur tangan Belanda. Ini semakin diperkuat sejak terbentuknya negara federal bentukan Belanda yakni Negara Indonesia Timur (NIT)<sup>2</sup>, yang berkuasa secara *de facto* dan *de jure* di wilayah yang disebutnya sebagai daerah-daerah Indonesia Timur, termasuk Sulawesi Selatan<sup>3</sup>, dan terutama Kota Makassar yang memperoleh kedudukan sebagai ibukota-nya.

Kota Makassar akhirnya bergabung ke dalam Republik Indonesia setelah NIT (bersamaan dengan RIS) bubar pada tahun 1950. Namun, pasca integrasi tersebut, Sulawesi Selatan dan termasuk Kota Makassar justru memasuki masa-masa bergolak akibat terjadinya berbagai peristiwa, seperti Pemberontakan Andi Azis (1950), Pemberontakan Kahar Muzakkar (1950-1965), dan Permesta (1957-1961). Di saat bersamaan, Kota Makassar dengan segala dinamika dan kompleksitasnya tetap berjalan ke arah modernisme meskipun dengan segala ironi yang mengiringinya. Paralel dengan hal tersebut, kota ini mengalami apa yang

---

<sup>2</sup> Ilham Daeng Makkelo, “Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar Pada Abad Ke-20”, *Jurnal Sejarah* . Vol. 1(2), 2018. hlm. 51.

<sup>3</sup> Dias Pradadimara, “Kronika di Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an”, dalam Dias Pradadimara dkk. (Editor), *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2014), hlm. 14.

disebut proses ‘etnisasi’, yaitu bergesernya citra kota Makassar dari kosmopolitan ke ‘provinsial’ yang ditandai dengan penonjolan keetnisan yang kuat.<sup>4</sup>

### **2.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif Kota Makassar**

Secara geografis, Kota Makassar terletak pada posisi 119°24’17, 38” Bujur Timur dan 5°8’6,19” Lintang Selatan, dan berada pada 0-20 meter di atas permukaan laut. Oleh karena posisi geografis yang demikian dan letaknya pinggir pantai maka kota ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22°-32° C, dan hanya mengenal dua musim seperti wilayah lain di Indonesia yakni musim kemarau dan musim hujan.<sup>5</sup> Musim hujan berlangsung bulan Oktober hingga Desember pada waktu akhir tahun dan dari bulan Januari hingga April pada awal tahun. Musim kemarau berlangsung antara bulan Mei hingga September. Curah hujan pada umumnya tinggi, yaitu 2000-3000 mm pertahun dengan hari-hari hujan rata-rata 108 hari pertahun. Arah angin 210°15’ Bujur Timur atau arah selatan daya dengan kecepatan angin rata-rata 5.1 Km (Kilometer) dan kelembaban antara 73% - 86%.<sup>6</sup>

Dalam hal administratif, Kota Makassar telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada saat Negara Indonesia Timur dibentuk tanggal 24 Desember tahun 1946 nama Makassar masih digunakan sebagai daerah *Gemeente*. Bulan Mei 1950

---

<sup>4</sup> Lihat Pradadimara, “Dari Makassar ke Makassar..”, *Op. Cit.*, hlm. 94-95.

<sup>5</sup> Shaifuddin Bahrum, *Cina Peranakan Makassar Pembauran Melalui Perkawinan Antarbudaya*, (Makassar: Yayasan Baruga Nusantara, 2003), hlm. 34.

<sup>6</sup> Anwar Arifin, *Pers dan Dinamika Politik*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), hlm. 100.

nama *Gementee* Makassar diubah menjadi Kota Besar Makassar (KBM).<sup>7</sup> Lalu pada 1952 melalui PP RI Nomor 34, dibentuk 7 Daerah Swatantra atau daerah. Ketujuh daerah tersebut adalah Makassar, Bonthain (Bantaeng), Bone, Pare-Pare, Mandar, Luwu, dan Sulawesi Tenggara. Status swatantra sangat penting, karena status ini mengacu pada adanya otonomi daerah, yang berarti mereka harus memiliki kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud peran serta warga.<sup>8</sup>

Berselang kurang lebih 5 tahun, pada bulan Januari 1957 rencana pembentukan daerah baru sebagai pemekaran dari daerah-daerah yang sebelumnya dibentuk di tahun 1952 diproses di Jakarta. Akhirnya di bulan yang sama melalui UU Darurat disetujui dibentuknya Daerah-Daerah Gowa, Makassar, dan Jeneponto-Takalar dari sebelumnya Daerah Makassar<sup>9</sup>. Hal ini yang juga berlaku di daerah Bone dan Luwu.

Selanjutnya, berdasarkan UU No. 29 tahun 1959 Kota Besar Makassar berubah menjadi Daerah Tingkat II Kotapradja Makassar<sup>10</sup>. Lebih jauh, Kota Makassar kemudian menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor

---

<sup>7</sup> Andi Mulya Sultani, “Perkembangan Kotamadya Ujung Pandang 1971-1999”, Skripsi (Makassar: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 2007), hlm. 23.

<sup>8</sup> Lihat Pradadimara, “Dari Makassar ke Makassar:...”, *Op. Cit.*, hlm.18.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>10</sup> Joyce Gani, “Cina Makassar: Suatu Kajian Tentang Masyarakat Cina di Indonesia (1906-1959)”, Skripsi, (Makassar: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1990), hlm.18.

94). Masih di tahun yang sama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. Wilayah administrasinya 21 kilometer persegi (km<sup>2</sup>), yang terdiri dari 8 kecamatan dan terbagi ke dalam 48 lingkungan.<sup>11</sup>

Dengan luas wilayah yang terbilang kecil, tidak mengherankan jika kemudian pemerintah Kota Makassar mempertimbangkan rencana untuk memperluas wilayah kota seiring dengan bertambahnya penduduk dan kebutuhan ruang untuk pembangunan. Hal tersebut akhirnya dikonkritkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tentang “Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan” tertanggal 1 September 1971. Kebijakan itu memperluas Kota Makassar menjadi 175,77 km<sup>2</sup> dengan memasukkan sebagian daerah dari:

- a. Kabupaten Gowa, yang meliputi Desa-desa: Barombong, Karuwisi, Panaikang, Tellobaru, Antang, Tamangappa, Jongaya, Rapocini, Macini Sombala, Mangasa.
- b. Kabupaten Maros, yang meliputi Desa-desa: Bira, Daya, Tamalanrea, Bulurokeng, Sudiang.
- c. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi Desa-desa: Barrang Caddi, Barrang Lompo, Perjuangan/Kodingareng.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Yudhistira Sukatanya, “Dari Makassar ke Makassar”, dalam Goenawan Monoharto dan Yudhistia Sukatanya, *Makassar Doeleo, Kini, dan Nanti*, (Makassar: Yayasan Losari Makassar, 2000), hlm. 67-68.

<sup>12</sup> Untuk lebih lengkap lihat PP. No. 51 Tahun 1971.

Dengan perluasan itu berubahlah batas-batas wilayah Kota Makassar. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sebelah utara dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), sebelah timur dengan kabupaten Maros dan sebelah barat dengan selat Makassar.<sup>13</sup> Namun, tidak hanya batas wilayah yang berubah, melalui PP yang sama, dalam pasal 3 disebutkan pula bahwa:

“Kotamadya Makassar sesudah diperluas Daerahnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini dirubah namanya menjadi Kotamadya Ujung Pandang”.

Mungkin tidak disadari pada saat itu bahwa nama baru ini dapat melepaskan konotasi etnis kota ini, sejalan dengan menurunnya proporsi penduduk berbahasa Makassar ataupun yang lahir di Makassar. Setelah itu, seorang yang berasal dari Majenne atau yang berdarah Madura atau Cina tanpa keraguan dapat menyebut dirinya “orang Ujung Pandang,” satu hal yang tidak dapat dilakukan sebelumnya dengan sebutan “orang Makassar.”<sup>14</sup> Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama karena pada tahun 1999 Makassar kembali menjadi nama kota ini.

### **2.1.2 Kondisi Penduduk Kota Makassar**

Awal tahun 1950-an, setelah kemerdekaan Indonesia sepenuhnya, Kota Makassar justru memasuki babak masa-masa ketidaktenangan akibat berbagai perlawanan kepada pemerintah pusat.<sup>15</sup> Berakhirnya riwayat NIT tidak berarti berakhir pula masa sulit. Masuknya Kahar Muzakkar ke hutan di tahun 1950

---

<sup>13</sup> Anwar Arifin, *Loc. Cit.*

<sup>14</sup> Pradadimara, “Dari Makassar ke Makassar..”, *Op.Cit.*, hlm. 88.

<sup>15</sup> Ilham Daeng Makkelo, *Op. Cit.*, hlm. 52.

menandakan dimulainya ‘masa gerombolan’ dan mengalirnya pengungsi ke Kota Makassar. Jika di tahun 1930 penduduk kota adalah sedikit di atas 84 ribu orang, maka di tahun 1961 penduduk kota sudah menjadi lebih dari 384 ribu (Sensus Penduduk 1961). Ini berarti bahwa selama 30 tahun Makassar mendapat tambahan 300 ribu jiwa atau tumbuh dengan laju hampir 5 persen per tahun. Dengan kata lain, dalam rentang waktu tersebut, penduduk Kota Makassar berlipat hampir 5 kali.<sup>16</sup> Dari sensus tahun 1961 diketahui pula bahwa kepadatan kampung-kampung di dalam kota sudah mencapai 356 ribu jiwa.

Dapat disimpulkan bahwa gerakan penduduk keluar dari daerah pedesaan di Sulawesi Selatan dari 1945 hingga 1970 telah menciptakan momentum yang tidak terhenti meskipun kondisi yang mendorong gerakan tersebut sudah berubah.<sup>17</sup> Bahkan setelah kondisi keamanan di pedesaan membaik, arus migrasi tetap mengalir ke Kota Makassar. Hal tersebut tentunya berdampak pada laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Sayangnya, meskipun dalam kurun waktu dari tahun 1930 hingga tahun 1960 penduduk kota ini terus mengalami pertambahan, namun sulit diketahui secara tepat dan rinci laju pertumbuhannya karena perhitungan penduduk yang cukup tepat baru dilakukan lagi setelah tahun 1960.

Selanjutnya, informasi mengenai jumlah penduduk kota Makassar dapat ditelusuri dari beberapa sumber. Walikota H.M. Daeng Patompo (menjabat tahun

---

<sup>16</sup> Pradadimara, “Dari Makassar ke Makassar: *Op. Cit.*, hlm. 88 .

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 91.



1965-1978) menulis bahwa penduduk Kota Makassar tahun 1965 adalah 415.826 jiwa dan sepuluh tahun kemudian (1975) bertambah menjadi 587.286 jiwa.

**Tabel 1.1 Perkembangan Penduduk Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1965-1975.**

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK
1965	415. 826 Jiwa
1966	424. 123 Jiwa
1967	432. 696 Jiwa
1968	445. 678 Jiwa
1969	450. 104 Jiwa
1970	432. 242 Jiwa
1971	553. 874 Jiwa
1972	561. 328 Jiwa
1973	564. 482 Jiwa
1974	575. 771 Jiwa
1975	587. 286 Jiwa

Sumber: Buku *Menyingkap Tabir Kegelapan (Fragmen Revolusi pembangunan)*<sup>18</sup>

Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar di masa Orde Baru berada jauh di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Kalau Provinsi Sulawesi Selatan selalu mengalami laju pertumbuhan yang rendah, sebaliknya Kota Makassar mengalami laju pertumbuhan yang relatif tinggi pada periode yang sama. Di dekade berikutnya, laju pertumbuhan penduduk kota mencapai 2,9 persen atau lebih dari dua kali laju pertumbuhan penduduk provinsi. Meskipun laju pertumbuhan penduduk kota menurun di dekade 1990-an, angkanya masih lebih tinggi dari angka laju

---

<sup>18</sup> M. Dg. Patompo, *Menyingkap Tabir Kegelapan (Fragmen Revolusi pembangunan)*, (Ujung Pandang: Percetakan SMP Frater Ujung Pandang, 1976). hlm. 30.

pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>19</sup> Di akhir masa Orde Baru, jumlah penduduk Kota Makassar sudah melebihi angka satu juta.

**Tabel 1.2 Perkembangan Penduduk Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1993-1998**

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK
1993	1.019.948 Jiwa
1994	1.048.201 Jiwa
1995	1.077.445 Jiwa
1996	1.107.267 Jiwa
1997	1.137.573 Jiwa
1998	1.168.515 Jiwa

Sumber: Statistik Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1996 dan 1998.

Dari segi etnis, Kota Makassar adalah kota yang dihuni penduduk dari beragam etnis. Meskipun Bugis dan Makassar adalah dua etnis mayoritas, namun kota ini juga dihuni oleh beragam etnis lain seperti Tionghoa, Mandar, Toraja dan etnis dari luar Sulawesi Selatan terutama dari Indonesia bagian timur yang telah lama mendiami dan menjadi bagian dari kota ini.

### **2.1.3 Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik**

- **Kondisi Ekonomi**

Ekonomi kota ini adalah ekonomi yang didasarkan pada sektor jasa yang sangat besar. Namun, apabila dalam teori ekonomi dikatakan bahwa sektor tersier (jasa) merupakan perkembangan dari ekonomi sekunder (manufaktur), maka tidak demikian dengan ekonomi kota ini. Ekonomi Kota Makassar tidak pernah merupakan ekonomi manufaktur, bahkan sejak sebelum pendudukan Jepang.

---

<sup>19</sup> Pradadimara, "Dari Makassar ke Makassar:...", *Loc. Cit.*

Peranan Kota Makassar sebagai kota perdagangan dan pelabuhan transit jauh lebih penting daripada peranannya sebagai daerah industri.<sup>20</sup> Meskipun sektor informal ini menjadi sektor penopang dan yang paling banyak menyerap tenaga kerja penduduk kota, namun sektor ini kurang diperhatikan dan pekerjaannya begitu rentan terpinggirkan.<sup>21</sup>

Kondisi perekonomian Kota Makassar pasca kemerdekaan juga sangat dipengaruhi oleh kekacauan dan ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa itu. Secara umum selama tahun 1945-1966, keadaan penduduk Makassar yang mayoritas beragama Islam, masih hidup dalam keadaan kekurangan. Pendapatan perkapita sampai tahun 1966 masih berkisar USS 80 pertahun, dan jumlah kematian seluruh penduduk masih sekitar 1%. Hal ini dapat dipahami, karena penduduk kota Makassar dan daerah di belakangnya (Selawesi Selatan) menderita kekacauan dan ketidakstabilan politik selama sekitar 25 tahun.<sup>22</sup>

Walaupun pada umumnya pekerjaan pokok penduduk kota Makassar adalah perdagangan dan usaha, namun ada variasi berdasarkan etnis (suku). Orang-orang Makassar dan Bugis terutama orang Wajo menguasai perdagangan hasil bumi. Orang-orang Wajo berdomisili di sekitar pelabuhan yang kemudian daerah itu dikenal sebagai distrik Wajo. Orang-orang Mandar selain berdagang kecil-kecilan juga banyak yang terjun sebagai nelayan terutama di pantai Mariso dan Tallo.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>21</sup> Lihat Ilham Daeng Makkelo, "Kekerasan Dan Kriminalitas Di Perkotaan: Anomali Kota Makassar Modern Pada Abad Ke-20", *Jurnal Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya*, Vol. 14, No. 2, 2019. hlm. 61.

<sup>22</sup> Anwar Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 104.

Orang-orang Banjar banyak bergerak dalam perdagangan perhiasan, pertukangan perhiasan, dan penjahitan (songkok, dan lain-lain). Orang Arab, India, dan Pakistan pada umumnya berdagang kain, rempah, obat-obatan dan alat olahraga. Orang Cina selain menjadi pedagang perantara hasil bumi, juga banyak yang berdagang kelontong (barang campuran/kebutuhan sehari-hari) dan bergerak di bidang pertukangan. Orang Timor, Buton, Jawa, dan Toraja kebanyakan menjadi buruh. Khusus orang Jawa juga banyak yang membuka usaha rumah makan.<sup>23</sup>

Untuk memperbaiki kondisi perekonomian penduduk Kota Makassar, H. M. Daeng Patompo yang dilantik menjadi walikota pada 8 Mei 1965 kemudian menyusun pola pembangunan 5 tahun. Lahirlah sebuah kerangka kerja yang disusun dalam “Pola Dasar Pembangunan Kotamadya Makassar” dengan sasaran memberantas 3 K, yaitu Kemiskinan, Kebodohan, dan Kemelaratan.<sup>24</sup>

Meski angka pertumbuhan ekonominya tidak melulu bergerak dengan grafik meningkat, pendapatan perkapita Kota Makassar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Contohnya jika pada tahun 1993 pendapatan perkapita hanya Rp.1.588.534 maka di tahun 1997 (dalam statistik yang dipublikasikan pada tahun 1998) naik menjadi Rp.2.669.734.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Anwar Arifin, *Ibid.* hlm. 103-104.

<sup>24</sup> Abdurrazak Mattaliu & Andhy Pallawa, *H. M. Dg. Patompo Biografi Perjuangan*, (Yayasan Pembangunan Indonesia, 1997). hlm. 47.

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, *Kotamadya Ujung Pandang Dalam Angka 1998*, (Ujung Pandang: BPS Kotamadya Ujung Pandang, 1999) hlm. 270.

- **Kondisi Sosial**

Sepanjang tahun 1950-an hingga setidaknya tahun 1965, Kota Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum disebut sebagai wilayah yang penuh pergolakan. Situasi tersebut tidak terlepas dari terjadinya beberapa peristiwa, baik yang terjadi di Kota Makassar sendiri maupun yang terjadi di Sulawesi Selatan secara umum. Gerakan pemberontakan dan operasi militer yang dilakukan tidak hanya menyebabkan ketidakstabilan politik, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. ‘Keresahan’ akibat ketidakamanan membuat masyarakat berbondong-bondong bermigrasi ke Kota Makassar. Gelombang migrasi penduduk ini belakangan juga memunculkan berbagai persoalan sosial dalam kehidupan masyarakat Kota Makassar, termasuk terbentuknya permukiman miskin di daerah pinggiran dan meningkatnya kebutuhan akan lapangan kerja.

Selepas tahun 1965, stabilitas keamanan perlahan mulai membaik, namun persoalan sosial masyarakat Kota Makassar tidak hilang begitu saja. Ketika geliat modernitas yang telah dimulai sejak paruh pertama abad ke 20 terus berlanjut, sayangnya berbagai persoalan sosial turut mengiringinya.

Perkembangan kota melalui pembangunan fisik kota secara besar-besaran pada masa Orde Baru melahirkan permasalahan yang semakin kompleks dan sulit terpecahkan. Di Kota Makassar, permasalahan tersebut tampak dengan nyata baik pada lingkungan (fisik) kota maupun pada permasalahan sosial masyarakat. Permasalahan terutama dirasakan oleh penduduk kota yang tidak mampu

menghadapi dan mengambil keuntungan dari perubahan yang terjadi.<sup>26</sup> Pada masa Orde Baru, kriminalitas berkembang dari ‘kegagalan’ modernisasi meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk yang mengakibatkan meluasnya ketimpangan sosial, kemiskinan, dan pengangguran.<sup>27</sup>

- Kondisi Politik

Sejak 1949 masyarakat sudah mengambil peranan langsung dalam politik melalui unjuk rasa menuntut bergabungnya NIT dengan RI. Pada tahun 1952 peran serta politik ini dapat diwujudkan dalam bentuk formal melalui proses pemilihan umum anggota Dewan Kota Makassar.<sup>28</sup> Terlepas dari sedikitnya jumlah pemilih, proses pemilihan itu harus dihargai sebagai satu proses pemilihan langsung pertama yang dilakukan di alam kemerdekaan Sulawesi Selatan. Lebih jauh lagi, dalam proses pemilihan ini partai-partai politik (selain juga organisasi kemasyarakatan lain) sudah mengirimkan calon-calonnya untuk dipilih duduk dalam DPRD Kota Besar Makassar. Beberapa partai yang mengirim calon dan berhasil menempatkan wakilnya dalam DPRD antara lain Masyumi, Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Partai Katolik. Kalau pengalaman politik berparlemen sudah dimulai sejak masa NIT, maka proses pelibatan masyarakat luas

---

<sup>26</sup> Ilham, “Penyeragaman dan Wajah Buram Modernitas di Kota Makassar Pada Masa Orde Baru”, *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol.4 No. 1, 2019, hlm. 16.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 27

<sup>28</sup> Pradadimara, “Kronika di Sulawesi Selatan...”, *Op. Cit.*, hlm. 19.

dalam kehidupan bernegara, melalui pemilihan langsung di tahun 1952 adalah suatu proses pertama yang menjadi wujud nyata kemerdekaan bagi semua rakyat.<sup>29</sup>

Aktivitas politik bisa jadi cerminan terbangunnya tatanan lembaga politik modern di tingkat lokal dan ini menandai munculnya elit baru.<sup>30</sup> Pada Pemilu 1955, PKR yang merupakan partai lokal dan mencalonkan tokoh-tokoh lokal termasuk pada bangsawan seperti Lanto Daeng Pasewang, Saleh Lahade, dan bahkan Andi Pangerang Petta Rani dan Andi Djemma, hanya memperoleh 2,3% dari seluruh suara sah di Sulawesi Selatan – satu tanda berakhirnya dukungan terhadap kelompok elit tradisional di zaman yang berubah.<sup>31</sup> Hasil pemilu 1955 di Kota Makassar, seperti juga di Sulawesi Selatan secara umum, didominasi partai-partai islam dan partai agama lainnya.

Di masa Orde Baru, kita menjumpai situasi yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, kehidupan politik baik nasional maupun lokal memang mengalami dinamika dan perubahan. Partai-partai baru bermunculan sementara partai lama yang tak mampu bertahan, tenggelam dalam arus zaman. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) juga turut mengambil peranan dalam kancan perpolitikan. Di Kota Makassar, bahkan sejak tahun 1965 hingga tahun 1994 walikota Makassar selalu memiliki latar belakang anggota militer. Di lembaga legislatif, pada tahun 1998, berdasarkan hasil pemilu 1992 dan 1997, jumlah

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Ilham Daeng Makkelo, *Menjadi...* hlm. 52.

<sup>31</sup> Pradadimara, *Op. Cit.*, hlm. 23.

anggota DPRD yaitu 45 orang, yang terdiri dari fraksi FKP 24 orang, FPP 11 orang, ABRI 9 orang, dan PDI 1 orang.<sup>32</sup>

## **2.2 Etnis Tionghoa di Kota Makassar**

### **2.2.1 Awal Mula Kedatangan Etnis Tionghoa di Kota Makassar**

Ada dokumen yang menunjukkan bahwa komunitas muslim Tionghoa sudah ada pada abad ke-15 dan 16 di sepanjang pantai utara Jawa. Hal yang terkait dengan komunitas tersebut ialah adanya kunjungan utusan kenamaan asal Cina, Zeng He, ke Jawa. Ia adalah seorang muslim dan dilaporkan mengunjungi Jawa beberapa kali antara tahun 1405 dan 1433. Menariknya, tidak ada dokumentasi lebih lanjut tentang komunitas muslim tersebut. Kemungkinan besar, para Tionghoa muslim tersebut terserap sepenuhnya ke dalam populasi mayoritas muslim.<sup>33</sup>

Di Sulawesi Selatan, penemuan keramik-keramik Tionghoa yang tertua di daerah pedalaman tidak menjadi bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa orang-orang Tionghoa telah datang sebelum abad ke-16-17.<sup>34</sup> Namun, ada beberapa sumber yang dapat menjadi rujukan terkait awal kedatangan orang Tionghoa ke Kota Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum. Kehadiran orang Tionghoa di Sulawesi Selatan dilaporkan dengan jelas dalam masa kerajaan Gowa-Tallo. Orang Eropa pertama kali yang mengabarkan ini adalah George Cockayne, yang mengepalai loji Inggris di Makassar. Dalam sebuah surat bertanggal 16 Juli 1615

---

<sup>32</sup> BPS Kota Makassar, *Op. Cit.*, hlm.11.

<sup>33</sup> Mely G. Tan, *Etnis Tionghoa di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

<sup>34</sup> Yerry Wirawan, *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar*, (Jakarta: KPG, 2013), hlm. 9.



yang ditujukan kepada Sir John Smith, Gubernur dari East India Company (EIC), Cockayne melaporkan bahwa dia menjual beras pada seorang Tionghoa di kota tersebut yang memiliki penyulingan arak.<sup>35</sup>

Sumber lain yang juga dapat menjadi patokan mengenai kehadiran orang Tionghoa di Kota Makassar pada abad ke-17 ialah tulisan Heather Sutherland. Dalam tulisannya ia menyebutkan bahwa pusat *Vlaardingen* adalah *Chinessestraat* (sempat jadi *Tempelstraat* dan kini Jalan Sulawesi). Seperti namanya, ini adalah tempat di mana hampir semua orang Cina bermukim.<sup>36</sup> Sebelum masa itu bukannya tidak ada orang Tionghoa, sebab bahkan sebelum perang Makassar, telah ada perkampungan Tionghoa dan perwakilan dagang Cina yang didirikan di wilayah kerajaan Gowa pada tahun 1618. Akan tetapi, tidak ada data yang dapat dijadikan patokan terkait jumlah orang Tionghoa yang bermukim di kerajaan Gowa pada awal abad ke-17.

Orang Hok Kian adalah kelompok imigran Cina yang pertama bermukim di Makassar dalam jumlah yang cukup besar sampai abad ke-19. Mereka berasal dari Amoy dan sekitarnya (Tsiang Tsu, Tsoan Tsiu, dan sebagainya, Fu Kheien Selatan (daerah yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi luar negeri Tiongkok di abad ke 10 s.d. 19)).<sup>37</sup> Selain untuk berdagang, kekacauan akibat peperangan yang

---

<sup>35</sup> John Villiers, "One of the Especiallest Flowers in Our Garden: The English Factory at Makassar, 1613-1667", *Archipel* 39, 1990, h. 163 dalam Yerry Wirawan, *Op.Cit.* hlm. 10.

<sup>36</sup> Heather Sutherland, "Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Makassar: Perdagangan dan Kota di Abad ke-18", dalam Dias Pradadimara dan Muslimin A.R. Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 27.

<sup>37</sup> Shaifuddin Bahrum, *Op. Cit.*, hlm. 37.

terjadi di provinsi Fujian pada tahun 1650 menyebabkan pengungsian besar-besaran ke Asia Tenggara, dan meningkatkan jumlah populasi penduduk Cina di Hindia Belanda,<sup>38</sup> termasuk di Kota Makassar.

Imigran Cina lainnya adalah orang Hakka. Imigran ini berasal dari pedalaman propinsi Kuan Tong. Bentuk geografis daerah asal mereka ini kebanyakan daerah berbukit dan tandus. Mereka adalah orang Cina terbanyak setelah orang Hok Kian<sup>39</sup>, dan pada umumnya orang Hakka merantau karena faktor ekonomi.<sup>40</sup>

Selain itu juga bermukim di Makassar orang Cina yang berasal dari Kanton (Kwang Foe) yang berasal dari provinsi Kuang Tung. Mereka baru berimigran ke Makassar dalam abad ke-19. Walaupun orang Kanton hampir bersamaan datang dengan orang Hakka, namun keadaan ekonomi mereka berbeda. Pada umumnya orang Kanton bermodal lebih besar.<sup>41</sup> Seperti nama tempat asalnya, mereka berdialek Kanton, dan ini sedikit banyak berbeda dengan dialek imigran Tionghoa yang berasal dari daerah yang lainnya, misalnya Hokian, Hakka, dan Teo Chiu.

Terlepas dari asal daerah yang beragam, orang Tionghoa di Kota Makassar sebagaimana juga di Indonesia secara umum, terbagi menjadi dua kelompok besar,

---

<sup>38</sup> Eddy Prabowo Witanto, “*Mengapa Pemukiman mereka dijarah, Kajian Historis Pemukiman Etnis Cina di Indonesia*,” dalam I. Wibowo (Editor), *Harga yang harus dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama kerja sama dengan Pusat Studi Cina, 2000), hlm. 205.

<sup>39</sup> Shaifuddin Bahrum, *Loc. Cit.*

<sup>40</sup> Joyce Gani, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>41</sup> Shaifuddin Bahrum, *Op.Cit.* hlm. 38.

yang dikenal sebagai Tionghoa peranakan dan totok.<sup>42</sup> Hal ini mungkin karena perbedaan yang mulanya semata-mata bersifat rasial. Tionghoa totok adalah sejati, Tionghoa yang masih murni, sedangkan peranakan itu berasal dari keturunan campuran. Makna kedua sesuai dengan makna pertama; karena para imigran Tionghoa yang ke Indonesia sebelum abad ke-20 hampir semuanya laki-laki, maka berarti bahwa seorang Tionghoa totok adalah kelahiran Tiongkok dan setiap orang Tionghoa yang dilahirkan di Indonesia adalah peranakan.<sup>43</sup> Namun, dalam perkembangannya, kelahiran seseorang di Indonesia tidak otomatis berarti bahwa seorang adalah peranakan. Hal tersebut dikarenakan sudah banyak pula Tionghoa totok yang lahir di Indonesia, hanya saja secara keturunan mereka belum bercampur dengan etnis pribumi sehingga masih dikategorikan totok.<sup>44</sup>

Selain pembedaan yang didasarkan atas ras dan tempat kelahiran, indikator lain yang juga digunakan untuk membedakan antara peranakan dan totok ialah identifikasi kehidupan sosio kultural, termasuk penggunaan bahasa dan kebudayaannya. Orang peranakan dari generasi sebelum perang menggunakan bahasa Melayu Cina sebagai bahasa percakapan. Struktur dasar bahasa itu adalah bahasa Melayu, tetapi dipakai juga secara meluas istilah-istilah Hokkien dan Belanda.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 32.

<sup>44</sup> Di sisi lain mungkin ada saja “totok” yang tidak ingin disebut “totok” karena lahir di Indonesia meskipun orang tuanya berasal langsung dari Tiongkok.

<sup>45</sup> Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1984), hlm. 86.

Di sisi yang lain, Tionghoa totok dari generasi sebelum perang yang terdiri dari berbagai golongan, menggunakan berbagai bahasa dari Cina Selatan, dan sebagian besar adalah bukan orang-orang Hokkien (yaitu Hakka, Kanton atau Konghu dan lain-lain). Mereka masih berbahasa Cina dan berkumpul sesuai dengan bahasa masing-masing. Ikatan mereka dengan negara Cina (dan setelah 1949 juga dengan Taiwan) masih sangat dekat.<sup>46</sup>

Pembentukan dari masyarakat Cina dimulai ketika imigran yang datang dalam kelompok-kelompok yang kecil bermukim di Makassar. Mereka (kebanyakan Hok Kian) kemudian kawin dengan wanita setempat, karena wanita-wanita Cina hampir tidak ada yang bermigrasi keluar sebelum abad ke-20. Keturunan mereka kemudian membentuk masyarakat Cina peranakan yang mantap. Masyarakat ini kemudian membentuk kelompok tersendiri, setelah perkawinan campuran dengan wanita pribumi berkurang. Pada akhir abad ke-18 orang-orang Cina peranakan tetap melakukan perkawinan indogami. Bahkan para imigran yang baru, yang tidak banyak itu<sup>47</sup>, berusaha mencari pasangan hidupnya di antara wanita-wanita Cina peranakan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>47</sup> Tidak adanya imigrasi massal pada saat itu disebabkan kesulitan angkutan dan dekrit Kaisar negara Cina yang secara resmi melarang orang Tionghoa meninggalkan dan masuk kembali ke negara Cina. Lihat Suryadinata, *Op. Cit.*, hlm. 85.

<sup>48</sup> Joyce Gani, *Op. Cit.*, hlm. 34.

Dapat dikatakan, bahwa sejak abad ke-18 sampai permulaan abad ke-20 sebagian besar orang Cina dalam masyarakat Cina di Makassar adalah kaum peranakan. Kaum peranakan ini mengembangkan kebudayaan sendiri, yang tidak hanya merupakan campuran kebudayaan Cina dan pribumi, tetapi dalam banyak unsur kehidupannya telah menyerupai orang Makassar, sekalipun masih bisa dibedakan dari penduduk setempat, seperti misalnya penggunaan bahasa Melayu Cina atau bahasa Makassar sebagai bahasa yang dipergunakan sehari-hari.<sup>49</sup>

Tidak seperti kaum peranakan, kaum totok merupakan pendatang baru yang tiba menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hal itu terjadi sewaktu berlangsung pergulatan politik di negara Cina dan juga bersamaan dengan naiknya permintaan akan tenaga manusia di negara-negara jajahan di Asia Tenggara.<sup>50</sup> Karena kelompok imigran Tionghoa ini datang bersama dengan para wanita, maka berbeda dengan kaum peranakan, mereka tidak kawin dengan wanita pribumi. Mereka juga tidak berasimilasi dengan masyarakat peranakan yang telah ada sebelum mereka datang.

Tidak adanya perkawinan antara imigran baru ini dengan kaum pribumi membuat mereka secara ras tidak tercampuri. Dan karena mereka lahir di luar negeri (yaitu di negara Cina), orang pribumi menyebut mereka totok, yang berarti orang berdarah murni asing.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Suryadinata, *Op. Cit.*, hlm. 90.

### 2.2.2 Permukiman dan Populasi Etnis Tionghoa di Kota Makassar

Kita tahu bahwa sejak ibukota Makassar terletak di Somba Opu, telah ada perkampungan Tionghoa pada saat itu. Keterangan ini juga dibenarkan oleh pengarang *Sj'air Perang Makassar* yang mencatat bahwa pada saat Belanda menyerang kota tersebut di tahun 1667, mereka menembakkan meriam ke arah penyerang dari “Kampung Tjina”.<sup>51</sup> Sayangnya, tidak ditemukan data yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui secara pasti dimana letak persis kampung tersebut. Begitu pun tidak ada data yang menyebutkan jumlah penduduk Tionghoa yang bermukim di perkampungan itu.

Keberadaan “Kampung Tjina” sebenarnya tidak begitu mengherankan mengingat posisi Makassar dalam dunia perdagangan kala itu. Pada akhir abad ke-16 dan permulaan abad ke-17 Makassar telah menjadi pusat perniagaan pedagang dari Spanyol, Cina, Denmark, Inggris, dan sebagainya.<sup>52</sup> Cina sendiri kemudian mendirikan perwakilan dagangnya pada tahun 1618.

Sejak Perang Makassar berakhir, Speelman menata Makassar menjadi tiga bagian: pusat pemerintahan di Fort Rotterdam, pusat perdagangan di “Negory Vlaardingen”, dan permukiman penduduk (kampung). Fort Rotterdam memiliki tembok-tembok batu yang besar, kubu-kubu, dan pintu gerbang. Vlaardingen dikelilingi oleh stokade yang lebih sederhana, dan dibelakangnya terdapat

---

<sup>51</sup> Yerry Wirawan, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>52</sup> Lihat Edward Poelinggomang, *Makassar Abad XIX Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), hlm. 23.

kampung. Pejabat, pegawai pemerintah, dan tentara umumnya bermukim dalam benteng dan wilayah sekitarnya, sementara pedagang Eropa dan Cina tinggal di pusat perdagangan. Di kampung bermukim petani, pedagang, dan Bumiputra (Melayu, Bugis, dan Makassar).<sup>53</sup> Kampung-kampung tersebut dinamai sesuai dengan asal penduduknya. Orang Cina, karena jumlah mereka semakin banyak dan tidak ada lagi lahan di Vlaardingien, diijinkan membangun permukiman di bagian utara Kampung Wajo, yang disebut kampung Cina.<sup>54</sup>

Tumbuhnya permukiman di sekitar Benteng Rotterdam ini menandakan adanya keterputusan historis antara daerah yang kelak menjadi Kota Makassar dengan bekas Benteng Somba Opu yang terletak di sebelah selatannya yang pernah menjadi pusat perdagangan di bawah kontrol penguasa Gowa. Permukiman di sekitar Benteng Rotterdam adalah kota baru yang tumbuh dari pelbagai elemen campuran yang menjadi akar kota di kemudian hari.<sup>55</sup> Salah satu elemen campuran itu ialah keragaman etnis masyarakatnya.

Etnis Tionghoa sejak semula pembentukan kota ini, telah menempati wilayah strategis yakni pusat perniagaan<sup>56</sup> di utara Benteng Rotterdam karena profesi mereka di bidang perdagangan. Jalan dimana kegiatan niaga itu terpusat

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 146-147.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Pradadimara, "Dari Makassar ke Makassa:r...", *Op. Cit.*, hlm. 81-82.

<sup>56</sup> Bermukimnya orang Tionghoa di pusat perdagangan bukanlah fenomena yang hanya terjadi di Kota Makassar. Hampir di semua kota Indonesia, besar ataupun kecil, terdapat daerah tempat tinggal penduduk Tionghoa di dalam dan di sekeliling pusat perdagangan. Lihat Charles A. Coppel, *Op. Cit.*, hlm. 30.

yaitu terutama di Pasarstraat (sekarang Jl. Nusantara) dan Chinastraat (sempat bernama Tempelstraat, namun sekarang Jl. Sulawesi). Mungkin dapat juga dikatakan bahwa daerah tersebut, termasuk kampung Cina dan daerah sekitarnya dapat berkembang sedemikian rupa salah satunya karena etnis Tionghoa bermukim dan menjalankan aktivitas usahanya di sana.

Ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan peraturan tentang sistem permukiman (*wijkenstelsel*) maka etnis Tionghoa turut termasuk yang dibatasi permukimannya. Hal itu disebabkan karena peraturan yang mula-mula diterapkan di Jawa pada tahun 1835 tersebut berbunyi “Orang Timur Asing yang penduduk Hindia Belanda, sedapat mungkin dikumpulkan di daerah-daerah terpisah di bawah kepemimpinan mereka masing-masing”.<sup>57</sup> Sistem permukiman ini melarang orang Tionghoa untuk hidup diantara orang-orang pribumi, dan ini telah membatasi komunikasi antara orang Tionghoa dengan etnis lain.<sup>58</sup> Dampaknya orang Tionghoa semakin terkonsentrasi di satu daerah tersendiri. Dalam kasus Makassar, mereka terkumpul di kawasan Kampung Cina yang berpusat di sekitar Jalan Timor, Jalan Sulawesi, Jalan Sangir, Jalan Lembeh, dan Jalan Bali.<sup>59</sup> Di jalan

---

<sup>57</sup> Seperti sebelum penaklukan Makassar, masyarakat Tionghoa berada di bawah pimpinan seorang yang disebut “kapitan”. Terminologi kapitan di sini digunakan dalam arti ‘pemimpin masyarakat’. Dalam huruf mandarin dialek Hokkian tertulis kap-pit-tan. Kapitan ini tidak memiliki kewajiban militer, namun dia memiliki fungsi sebagai hakim yang memutuskan persengketaan dalam perdagangan dan dalam masyarakat Tionghoa. Lihat Yerry Wirawan, *Op. Cit.*, hlm. 68.

<sup>58</sup> Lihat Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002), hlm. 75-76.

<sup>59</sup> Muslimin A.R. Effendy, “Tionghoa Makassar di Tengah Pusaran Sejarah” dalam Dias Pradadimara dan Muslimin A.R. Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 219.



ini tidak hanya berdiri rumah-rumah dan atau toko dengan arsitektur khas Tionghoa tetapi juga ada rumah ibadah, rumah abu, dan sekolah Cina.

Dari sensus yang dilakukan pada tahun 1680, jumlah total penduduk Makassar adalah 1.135 jiwa (tidak termasuk pegawai VOC) dan pemukiman Vlaardingen terdiri dari 87 orang Tionghoa, 97 orang *Mardijkers*, 20 Moors (Muslim India) dan orang Jawa, 18 orang Melayu (terdiri dari 4 pria, 9 perempuan dan 5 anak-anak).<sup>60</sup> Jumlah orang Tionghoa kemudian terus bertambah seiring waktu.

Penduduk Tionghoa di Makassar meningkat sepanjang abad ke-18. Menurut sensus yang dilakukan oleh VOC, di tahun 1722 jumlah penduduk Tionghoa bertambah sampai 917 jiwa, yang termasuk perempuan, anak-anak, dan budak.<sup>61</sup> Jumlah tersebut sebenarnya terbilang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Tionghoa di Batavia pada masa itu. Misalnya, jika kita mengacu pada jumlah korban peristiwa Geger Pecinan tahun 1740. Dalam peristiwa pembantaian yang berlangsung selama tiga hari itu, disebutkan bahwa lebih dari 10.000 orang Tionghoa yang tinggal di kota Batavia dibunuh. Jumlah itu saja sudah berkali-kali lipat dibandingkan jumlah orang Tionghoa di Kota Makassar pada masa itu.

Sementara itu jumlah penduduk kota pada 1861 adalah 22.285 jiwa: 795 orang Eropa, 3.935 orang Cina, tujuh orang Arab, dan 17.548 Bumiputra (tidak ada

---

<sup>60</sup> Sutherland, "The Makassar Malays: Adaptation and Identity", h. 405 dalam Yerry Wirawan, *Op. Cit.*, hlm.17.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

penduduk timur asing lainnya.<sup>62</sup> Namun, komposisi penduduk selalu berubah, bukan hanya dalam jumlah tetapi juga kewargaan. Pada 1893 misalnya, jumlah penduduk Timur Asing lainnya semakin meningkat, dengan komposisi 940 orang Eropa, 169 orang Arab, 30 orang Timur Asing lainnya, 2.618 orang Cina, dan 14.169 Bumiputra. Data ini menunjukkan bahwa jumlah orang Cina dan Bumiputra berkurang setelah kegiatan niaga mereka dipindahkan ke daerah produksi.<sup>63</sup> Berselang dua tahun, sumber lain melaporkan bahwa pada tahun 1895 jumlah orang Tionghoa yaitu 2.534 orang.<sup>64</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, di awal abad ke-20, penduduk Tionghoa mengalami penambahan yang cukup signifikan. Pada tahun 1906 dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie* disebutkan bahwa penduduk Makassar berjumlah kurang lebih 26.000 orang yang terdiri atas golongan Eropa 1.000 orang, Cina 4.600 orang, Timur Asing 200 orang, dan sisanya 20.200 orang penduduk setempat (pribumi).<sup>65</sup> Pertambahan sebanyak 2066 orang ini tidak hanya disebabkan adanya pertumbuhan dari penduduk yang telah ada sebelumnya, namun juga dikarenakan datangnya imigran Tionghoa yang datang di akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

---

<sup>62</sup> Poelinggomang, *Op. Cit.*, hlm. 148.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

<sup>64</sup> Heri Kusuma Tarupay, "Sejarah Sekolah Cina di Makassar 1908-1966: Proses Pembentukan Identitas Orang Cina", Skripsi, (Makassar: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, 2012), hlm. hlm. 25.

<sup>65</sup> Joyce Gani, *Op. Cit.*, hlm. 21-22.

Dalam sistem pemerintahan kota di awal abad ke-20, orang Cina mempunyai pimpinan sendiri yang disebut Mayor Cina (*Mayoor der Chineezen*) yang dibantu oleh seorang kapiten, dua letnan, dan beberapa kepala kampung (*wijmeesters*).<sup>66</sup> Kebijakan lain yang juga dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu ialah mengubah kedudukan orang Tionghoa dalam pengelompokan ras penduduk Hindia Belanda. Orang Tionghoa dan timur asing lainnya (*Vreemde Oosterlingen*) dimasukkan ke kelompok kedua setelah orang Eropa di kelompok pertama, sedangkan di bawahnya atau kelompok ketiga yaitu etnis pribumi.

Kedatangan imigran baru tentunya berdampak terhadap jumlah penduduk Tionghoa di Kota Makassar yang terus bertambah. Hal ini bisa dilihat terutama dari jumlah orang Tionghoa di Kota Makassar pada tahun 1930, dimana pada tahun tersebut jumlahnya sudah mencapai 15.482 orang. Adapun jika dirinci berdasarkan jenis kelamin maka jumlah tersebut terdiri dari 9.277 orang laki-laki dan 6.205 orang perempuan. Jumlah ini menyebar di berbagai distrik di Kota Makassar dengan rincian Distrik Makassar sebanyak 1379 orang, Distrik Mariso 259 orang, Distrik Ujung Tanah 263 orang, dan Distrik Wajo 13.581 orang.<sup>67</sup> Data ini menunjukkan bahwa orang Tionghoa di Kota Makassar paling banyak tinggal di Distrik Wajo. Hal tersebut tentunya tidak mengherankan karena perkampungan Cina, dimana mayoritas masyarakat Tionghoa bermukim berada di distrik tersebut.

---

<sup>66</sup> Shaifuddin Bahrum, *Op. Cit.*, hlm. 31

<sup>67</sup> Heri Kusuma Tarupay, *Op. Cit.*, hlm. 25-26.

Perkembangan penduduk etnis Tionghoa dalam dekade selanjutnya sulit untuk dipastikan karena setelah sensus penduduk tahun 1930, informasi tentang “suku bangsa” kelompok etnis baru ditanyakan kembali pada sensus tahun 2000. Namun, menurut laporan J.W. Klein, pada tahun 1947 penduduk Makassar telah mencapai lebih kurang 165.000 jiwa yang didalamnya terdapat Cina 32.000 jiwa.<sup>68</sup>

### **2.2.3 Masyarakat Tionghoa di Kota Makassar Pasca Kemerdekaan hingga Masa Orde Baru**

Pada tahun 1944 ketika tentara sekutu menyerbu Kota Makassar untuk mengambil alihnya dari Jepang, mereka merusak hampir keseluruhan kampung Tionghoa. Akibatnya, ribuan orang kehilangan rumah dan harus mengungsi ke daerah Gowa.<sup>69</sup>

Saat perang Pasifik berakhir, orang-orang Tionghoa Makassar meninggalkan daerah pedesaan tempat mereka mengungsi selama ini, dan mendapatkan kota Makassar dalam keadaan rusak parah. Mereka harus mengumpulkan bahan-bahan bangunan untuk memperbaiki atau bahkan membangun kembali rumah serta toko-toko mereka.<sup>70</sup> Pada masa ini orang Tionghoa mengalami kesulitan dalam hal tempat tinggal dan ekonomi, hal yang mungkin juga dialami oleh masyarakat etnis lainnya, tidak terkecuali pribumi.

Dalam rangka penataan kembali setelah kerusakan yang disebabkan oleh perang, orang Tionghoa di Kota Makassar melakukan beberapa hal. Diantaranya,

---

<sup>68</sup> Joyce Gani, *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>69</sup> Lihat Yerry Wirawan, *Op. Cit.*, hlm. 211-212.

<sup>70</sup> Yerry Wirawan, *Op. Cit.*, hlm. 113.

mereka memperbaharui perkumpulan, termasuk mendirikan organisasi baru, baik yang bersifat sosial, politik, maupun ekonomi. Salah satu yang didirikan pada saat itu dan kemudian dapat bertahan lama yaitu pembentukan Persatuan Tionghoa Peranakan (PERTIP) yang diresmikan pada tanggal 3 Maret 1946. Sekolah-sekolah Cina juga mulai dihidupkan pada masa ini setelah sempat vakum.

Sementara itu, pada tahun yang sama, sekitar delapan bulan setelah proklamasi kemerdekaan di Jakarta, tepatnya pada bulan April 1946 pemerintah Republik Indonesia yang pada saat itu berpusat di Yogyakarta mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan. Namun, undang-undang yang dilandaskan pada asas *jus soli* dan “sistem pasif” itu tidak banyak pengaruhnya terhadap mayoritas penduduk Tionghoa. Hal itu karena kaum republikan hanya menguasai wilayah yang kecil.<sup>71</sup> Kota Makassar sendiri di akhir tahun 1946 menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur hingga dibubarkannya pada tahun 1950.

Persoalan kewarganegaraan kembali mengemuka ketika dilakukan perundingan antara Belanda dengan Indonesia pada tahun 1949 di Den Haag. Perjanjian yang juga dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar tersebut memberi orang Tionghoa kesempatan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia secara pasif. Sebaliknya, mereka yang dalam waktu dua tahun (terhitung sejak 27 Desember 1949-27 Desember 1951) menolak kewarganegaraan ini, akan menjadi warganegara Cina. Akan tetapi karena adanya kesulitan dalam implementasinya, pemerintah Indonesia akhirnya membatalkan persetujuan ini dan kembali ke Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1946. Untuk konteks Kota Makassar,

---

<sup>71</sup> Suryadinata, *Dilema Minoritas...*, *Op. Cit.*, hlm. 116-117.

tidak diketahui berapa jumlah orang Tionghoa yang menerima ataupun menolak kewarganegaraan Indonesia pada periode ini.

Mengenai kewarganegaraan ini kemudian diatur kembali dalam rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1954, yang mengganti sistem pasif menjadi sistem aktif dan menerapkan asas *jus soli* dua generasi. Rancangan peraturan ini menimbulkan pro dan kontra bahkan di dalam parlemen sendiri, sehingga pemerintah memutuskan menarik kembali rencana tersebut.

Setahun kemudian, yaitu pada bulan April tahun 1955, pemerintah Indonesia dan RRC menandatangani Perjanjian Dwikewarganegaraan di Bandung. Perjanjian tersebut disusul pula dengan disetujuinya Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1958 (UU No. 62 tahun 1958) yang pada dasarnya mewarisi semangat rancangan 1954. Perjanjian Dwikewarganegaraan menyebutkan bahwa seseorang yang lahir di Indonesia sebelum 27 Desember 1949 dan yang tidak pernah menolak kewarganegaraan Indonesia (bagi dirinya dan anak-anaknya) memiliki waktu dua tahun sejak penandatanganan persetujuan untuk memilih kewarganegaraan Indonesia dengan cara melakukan pernyataan singkat. Jika tidak, mereka akan dianggap menerima kewarganegaraan Cina.

Dalam upaya mengatasi polemik kewarganegaraan ini, PERTIP di Kota Makassar turut mengambil peran. PERTIP berusaha membantu kaum peranakan mengembangkan pengetahuan tentang kehidupan politik Indonesia dan memilih kewarganegaraan Indonesia, seperti terlihat dalam nama perkumpulan ini yang baru pada 10 Mei 1953, yaitu “Persatuan Warganegara Indonesia Keturunan

Tionghoa”.<sup>72</sup> Meski tidak ditemukan data yang menyebutkan secara rinci jumlah orang Tionghoa di Kota Makassar yang memilih Kewarganegaraan Indonesia, namun masyarakat peranakan dalam jumlah besar memilih kewarganegaraan Indonesia. Banyaknya orang Cina (sebagian besar Cina Totok) yang menolak kewarganegaraan Indonesia pada waktu itu, disebabkan karena konsulat Cina (Nasionalis-Kuo Min Tang) secara terbuka telah menjamin dan menenangkan hati mereka.<sup>73</sup>

Belum selesai permasalahan kewarganegaraan, persoalan lain muncul. Pada tahun 1957, pemerintah Indonesia menuduh Pemerintah Nasionalis Tiongkok telah membantu sebuah gerakan pemberontakan yang dideklarasikan di Makassar pada 2 Maret 1957. Pemberontakan yang dimaksud yaitu Permesta (Perjuangan Semesta Alam). Setelah pemadaman pemberontakan ini, sekolah-sekolah dan perkumpulan pro Kuomintang ditutup untuk selamanya. Perusahaan dan bank-bank yang pemiliknya orang Tionghoa pro Kuomintang disita.<sup>74</sup>

Sementara di bidang ekonomi, etnis Tionghoa yang di awal kemerdekaan telah berupaya menata kembali perekonomiannya, kemudian dihadapkan kebijakan ekonomi yang diskriminatif. Namun, diantara kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, salah satu yang cukup berdampak yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1959. Peraturan itu melarang pedagang asing (kebanyakan tentunya orang Tionghoa) untuk memiliki toko atau berdagang eceran di pedesaan.

---

<sup>72</sup> Yerry Wirawan, *Op. Cit.*, hlm. 229.

<sup>73</sup> Joyce Gani, *Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>74</sup> Yerry Wirawan, *Op. Cit.*, hlm. 244.

Terminologi orang “asing” dalam konteks etnis Tionghoa di tahun 1959 bisa dibilang belum begitu jelas. Hal ini disebabkan perjanjian dwikewarganegaraan mengatakan bahwa setiap warga negara keturunan Tionghoa sebelum 20 Januari 1960 memiliki kewarganegaraan ganda. Adapun jika mereka ingin menjadi warga negara Indonesia maka harus menolak kewarganegaraan Cina dalam jangka waktu kesempatan memilih (20 Januari 1960-20 Januari 1962). Pada akhirnya kebijakan tersebut memukul rata semua etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia.

PP No. 10 tahun 1959 mengatakan bahwa orang asing itu masih diperkenankan tinggal di daerah tersebut, kecuali jika komandan militer setempat menetapkan lain dengan alasan keamanan.<sup>75</sup> Akan tetapi, bahkan sebelum kebijakan tersebut diundangkan, Panglima Militer di beberapa daerah telah mengundang bahwa daerah pedesaan terlarang bagi orang asing. Hal itu juga berlaku di Sulawesi Selatan. Sejak 27 Juli 1959, penguasa militer di Sulawesi Selatan mengumumkan bahwa semua wilayah pedesaan terlarang bagi orang asing. Namun mereka juga tidak dapat tinggal di Makassar, karena pada saat itu izin usaha hanya diberikan kepada perusahaan industri besar.<sup>76</sup> Akibat dari dikeluarkannya peraturan ini orang Tionghoa menjadi semakin urban dengan terkonsentrasi di daerah perkotaan.

Gelombang anti Tionghoa susul menyusul dalam tahun-tahun berikutnya setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Masa orde baru di bawah

---

<sup>75</sup> Untuk lebih jelas lihat Suryadinata, *Dilema Minoritas...Op. Cit.* hlm. 140-142.

<sup>76</sup> Yerry Wirawan, *Loc. Cit.*



kepemimpinan Soeharto dapat dikatakan merupakan era yang penuh kemelut bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Selain membekukan hubungan diplomatik dengan RRC, pemerintah orde baru juga mengeluarkan tidak sedikit kebijakan yang dikhususkan untuk masyarakat Tionghoa. Kebijakan tersebut antara lain perintah perubahan nama, penutupan sekolah-sekolah Cina, pembatalan Perjanjian Dwikewarganegaraan, pelarangan terhadap segala sesuatu yang berbau Cina termasuk aksara.

Dari sekian kebijakan pemerintah nasional terhadap masyarakat Tionghoa, beberapa diantaranya sulit diketahui bagaimana penerapan dan dampaknya di Kota Makassar. Di lain sisi, pemerintah daerah sendiri sebenarnya membuat kebijakan untuk masyarakat Tionghoa yang tinggal dalam wilayah yurisdiksinya. Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat keputusan tanggal 21 Desember 1966 tentang larangan bagi orang asing terutama orang Cina dalam daerah Sulawesi Selatan untuk ikut dalam perdagangan sembilan jenis bahan pokok (sembako).<sup>77</sup> Namun agaknya yang terkena imbas tidak hanya etnis Tionghoa asing namun etnis Tionghoa secara keseluruhan. Peraturan lain yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu larangan membentuk/mendirikan organisasi asing Cina

---

<sup>77</sup> Arsip Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988), Volume I. "Pd. Gubernur Kepala Daerah. Peraturan I Sulawesi Selatan/dan Kologda: Surat keputusan tanggal 21 Desember 1966 tentang larangan bagi orang asing terutama orang Cina dalam daerah Sulawesi Selatan untuk ikut dalam perdagangan 9 jenis bahan pokok". (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2015) No. Reg. 1806.

melalui Surat keputusan Nomor 154 tanggal 8 Mei 1969.<sup>78</sup> Hal ini tentunya tidak terlepas dari dibekukannya hubungan diplomatik antara Indonesia dan RRC.

---

<sup>78</sup> Arsip Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988), Volume I. “Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan: Surat keputusan Nomor. 154/V/1969 tanggal 8 Mei 1969 tentang larangan membentuk/mendirikan organisasi asing Cina”, (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2015) No. reg. 945.

### **BAB III**

## **PERISTIWA 10 NOVEMBER 1965: DARI DEMONSTRASI HINGGA PENGRUSAKAN PROPERTI ETNIS TIONGHOA**

Peristiwa G30S yang terjadi di Jakarta pada 30 September malam hingga dini hari 1 Oktober 1965 dan dituduhnya PKI sebagai dalang peristiwa tersebut telah menimbulkan aksi-aksi pengganyangan di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Makassar. PKI, organisasi massa, dan simpatisannya menjadi sasaran massa. Namun, seiring munculnya desas desus mengenai keterlibatan Tiongkok dalam peristiwa G30S dan beberapa faktor lainnya, etnis Tionghoa akhirnya turut menjadi sasaran pengganyangan meskipun dalam bentuk dan eskalasi yang berbeda dengan PKI.

Di Kota Makassar, meskipun aksi pengganyangan terhadap etnis Tionghoa berlangsung hingga setidaknya tahun 1966, namun dapat dikatakan yang paling parah terjadi pada 10 November 1965. Dilaporkan bahwa beribu-ribu orang terlibat dalam aksi yang berawal dari demonstrasi tersebut. Rumah, toko, kendaraan, dan harta milik etnis Tionghoa lainnya menjadi sasaran dan kerusakan yang diakibatkan peristiwa tersebut sangat luas. Peristiwa ini sekaligus menjadi peristiwa kekerasan terhadap etnis Tionghoa pertama yang terjadi di Kota Makassar.

### **3.1 Situasi Kota Makassar Pasca Gerakan 30 September 1965**

Beberapa jam pasca peristiwa Gerakan 30 September (G30S), atau tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi, informasi tentang terjadinya peristiwa tersebut belum sampai ke Kota Makassar. Pemberitaan koran-koran nasional dan lokal tidak